

# "KESEJAHTERAAN & PANEN BENCANA DI PROVINSI SENTRA SAWIT"

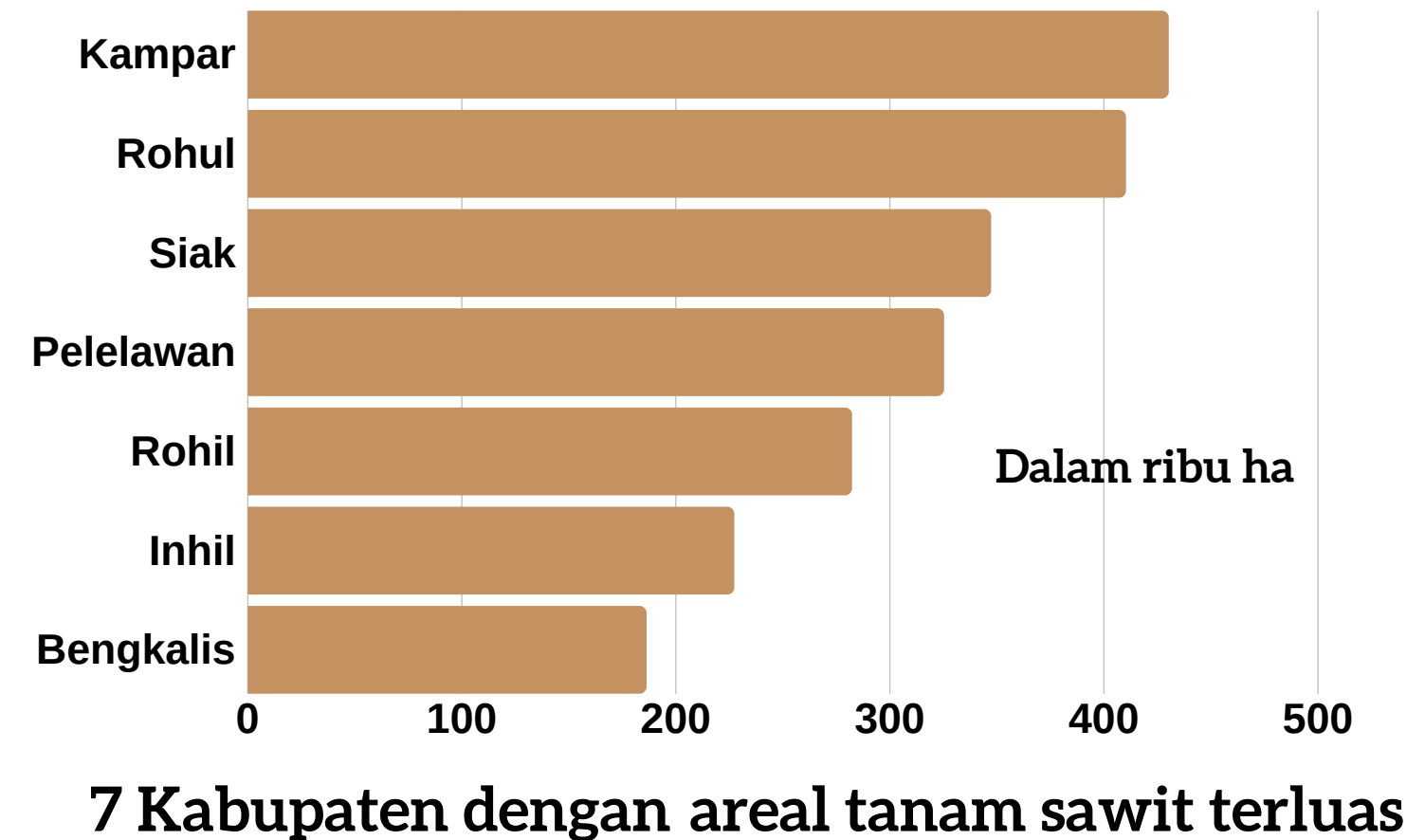
*Madani Berkelanjutan, Diserbu Sawit 6 Mei 2020*



## "GAMBARAN UMUM & PERSEPSI YANG MUNCUL PADA SAWIT RIAU"

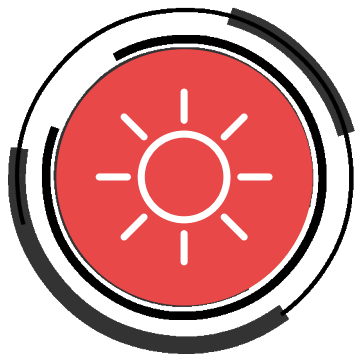


"3,4 juta ha luas sawit Riau,  
Terluas di Indonesia"

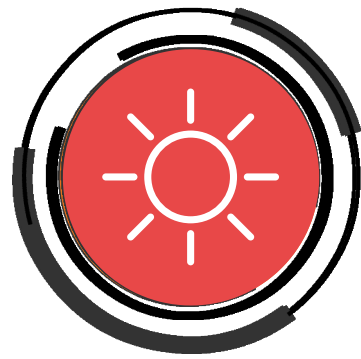


“ Atas fakta yang ada, persepsi yang muncul dan digaungkan kemudian menyatakan perkembangan perkebunan sawit berkontribusi pada kesejahteraan, peningkatan ekonomi maupun pembangunan desa. Namun di sisi lain terdapat fakta yang tidak dapat dihindari berupa bencana ekologis, kemiskinan dan rawan pangan. Diperlukan pemahaman mendalam untuk menjawab persepsi tersebut melalui data resmi yang tersedia”

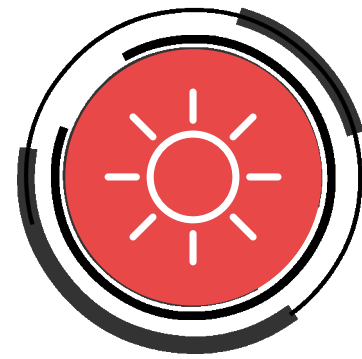
# SOROTAN UTAMA



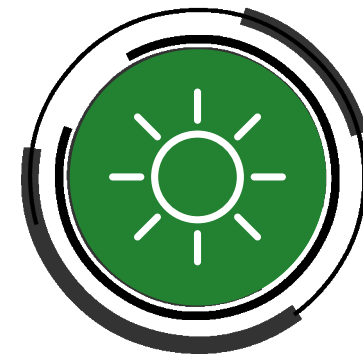
Urgensi  
Diversifikasi  
Komoditas  
Untuk Riau



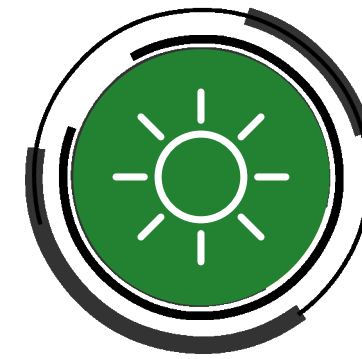
Perkebunan Sawit  
dan Kemandirian  
Desa di Riau



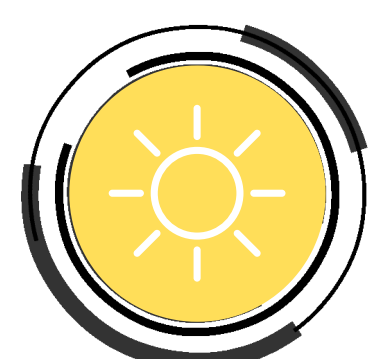
Menilik  
Kesejahteraan  
Petani Sawit  
Rakyat Riau



Hilangnya  
Tutupan Hutan  
dan Konsekuensi  
Bencana di Riau



Kerawanan Bencana  
di Desa Sekitar  
Perkebunan Sawit  
Riau

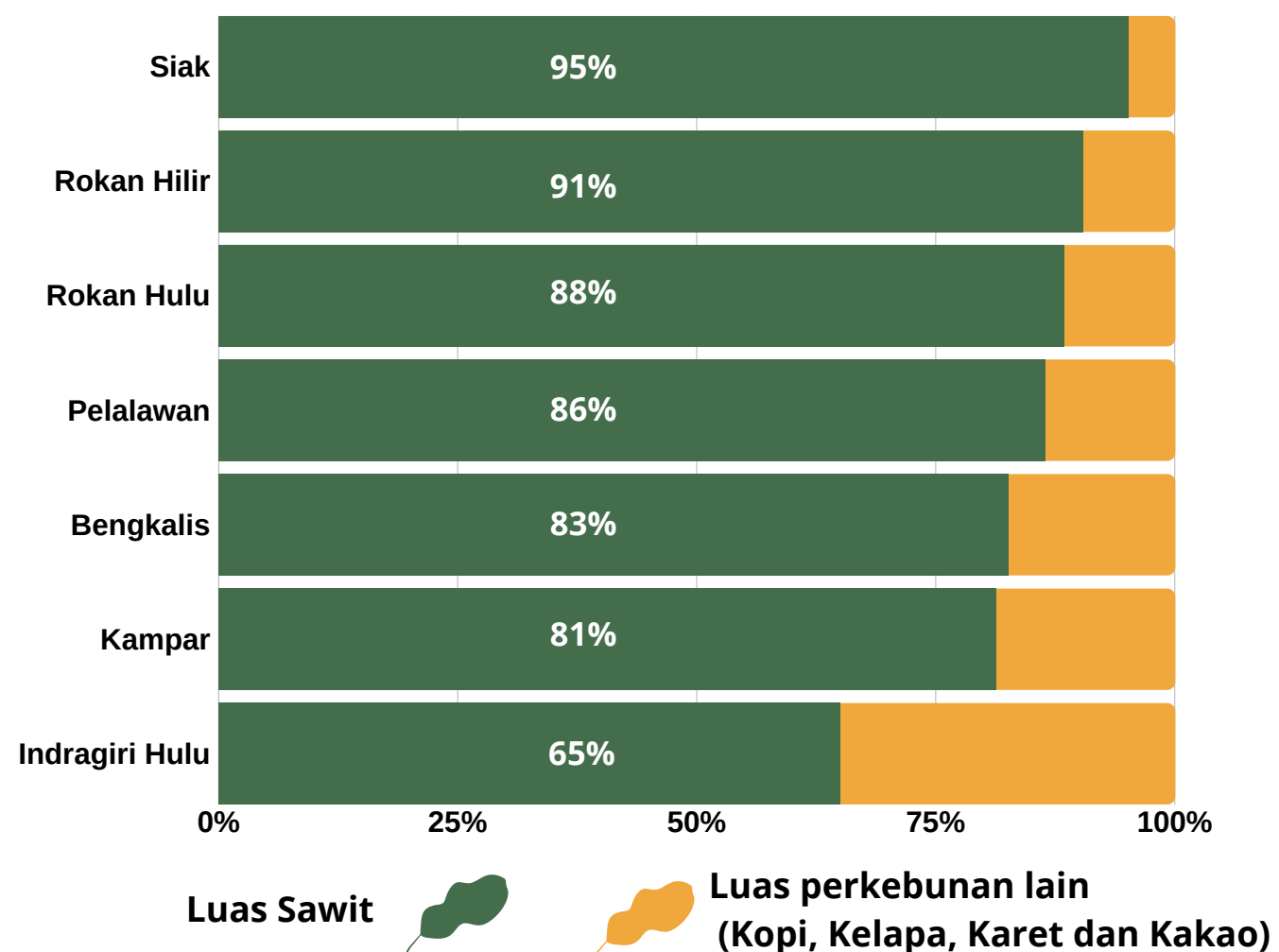


Kerugian  
Ekonomi atas  
Karhutla 2019 di  
Konsesi Sawit  
Riau



# PERBANDINGAN LUAS SAWIT DENGAN LUAS KOMODITAS PERKEBUNAN LAIN DAN PERTANIAN RIAU

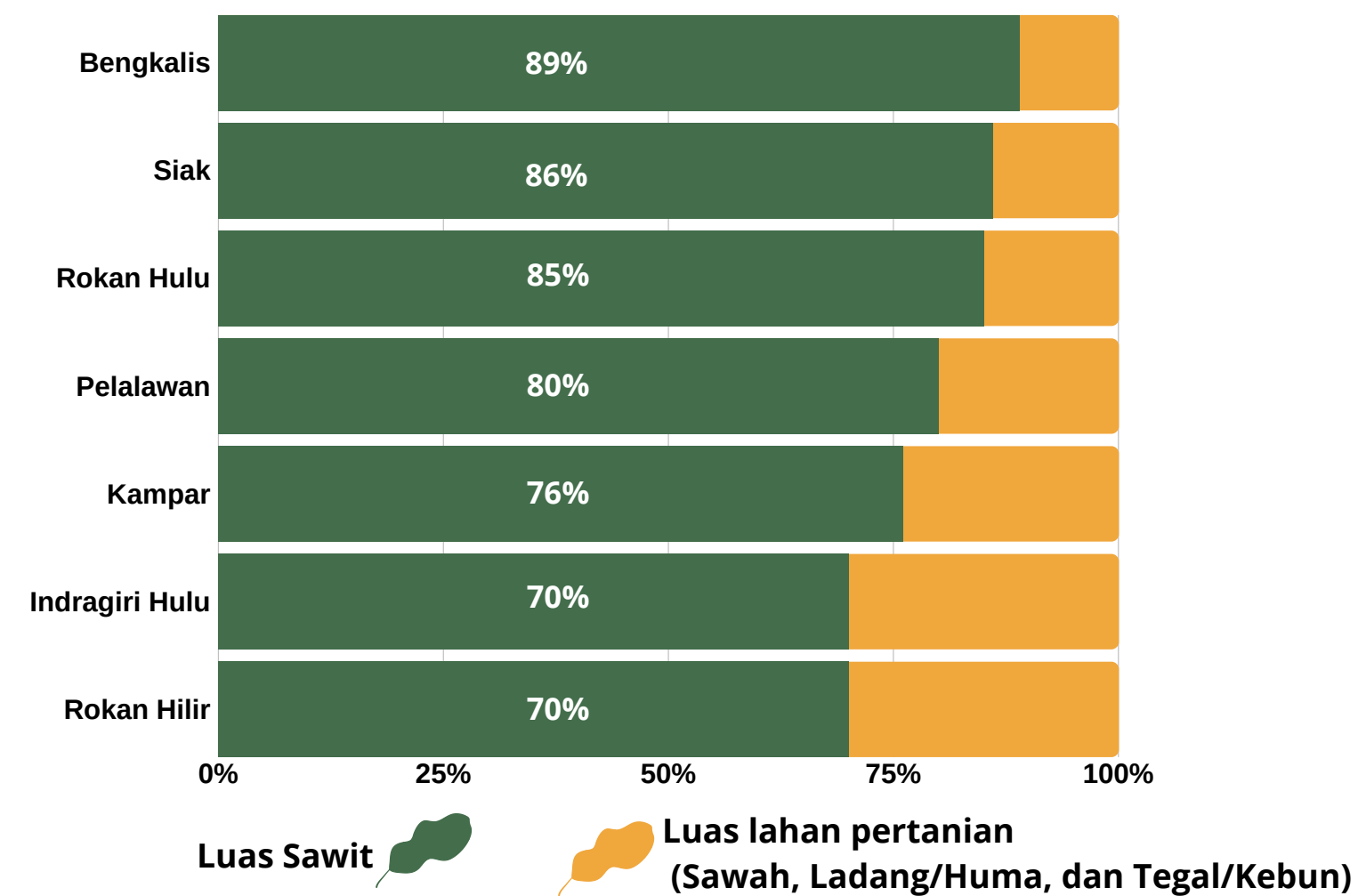
KOMODITAS PERKEBUNAN LAIN



Sumber: Riau dalam Angka 2019 & RPJMD Kabupaten



PERTANIAN

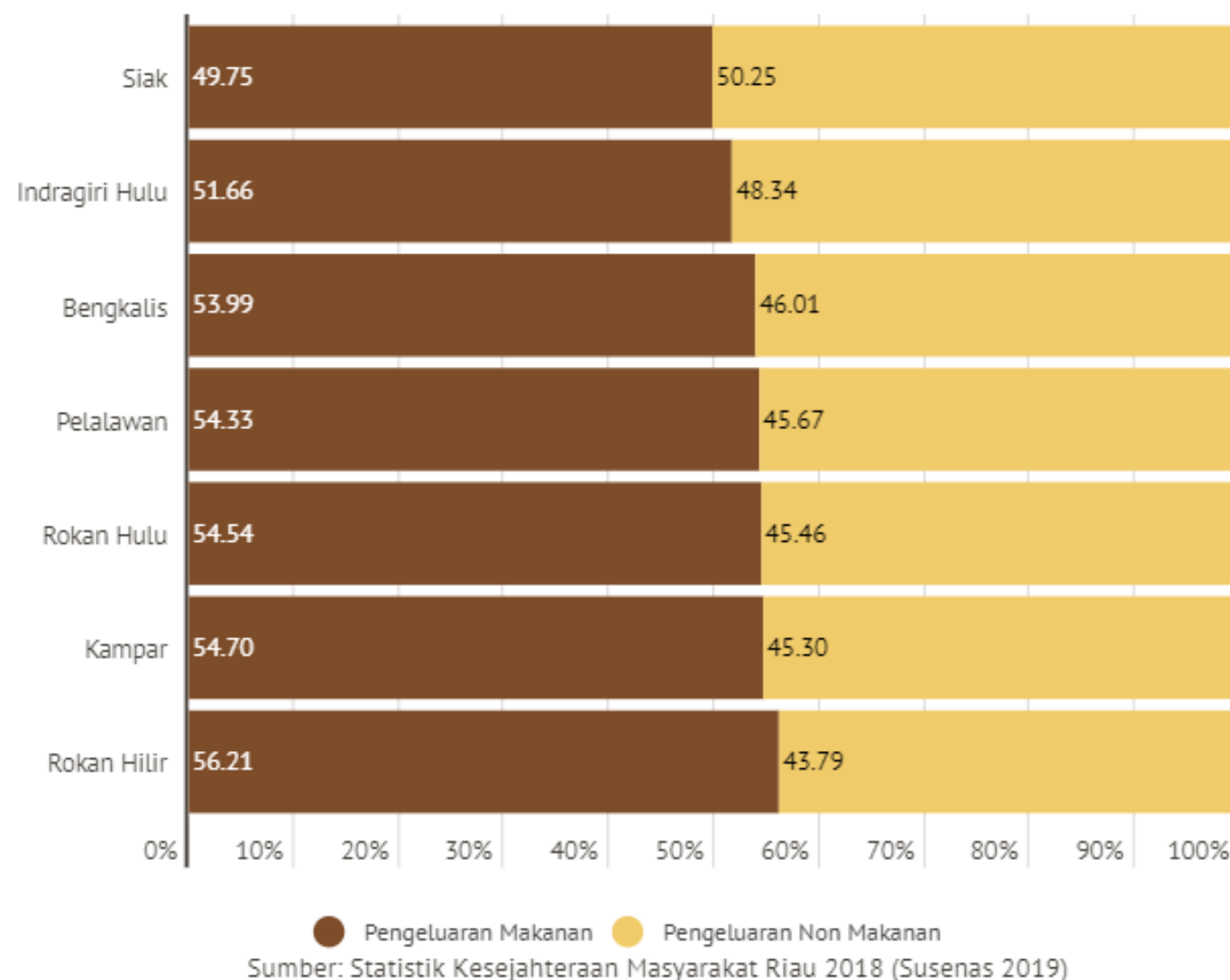


Sumber: Riau dalam Angka 2019 & Statistik Lahan Kementan 2019

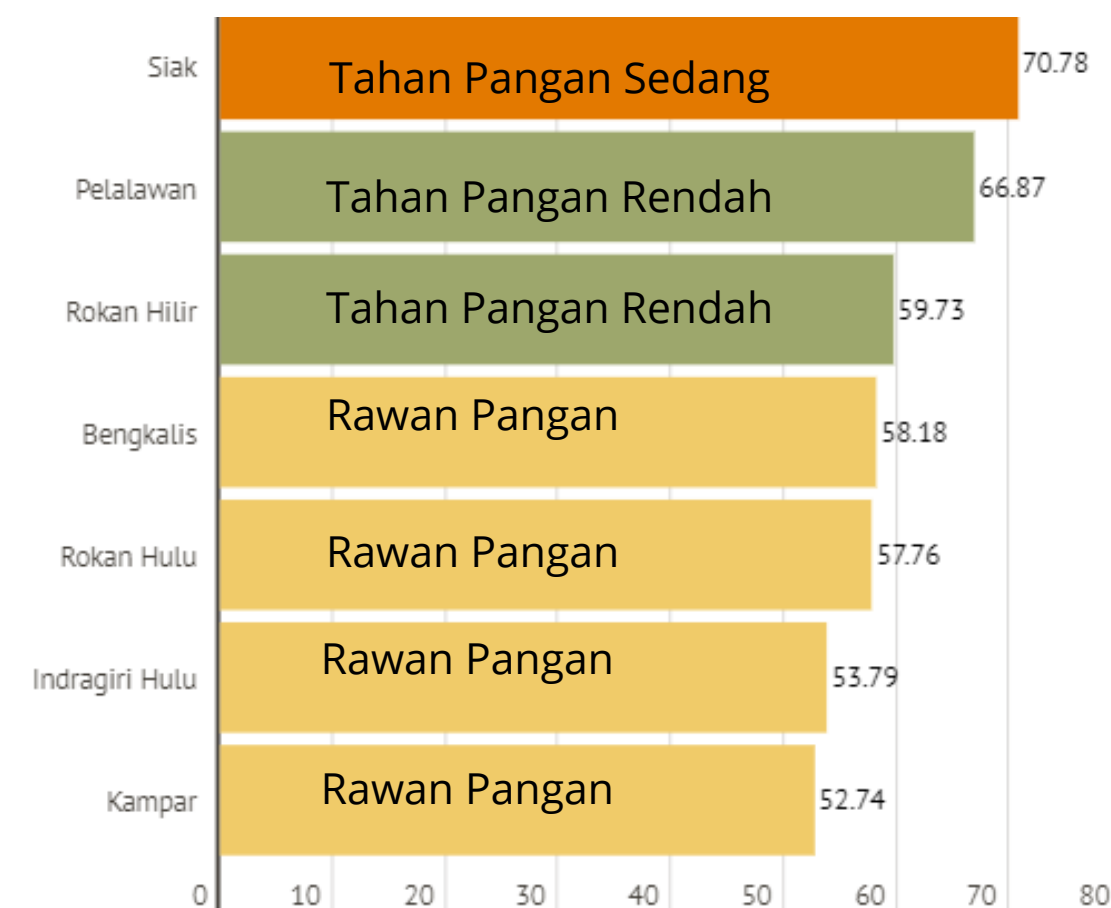
“Penguasaan lahan komoditas perkebunan lain dan lahan pertanian sangat timpang dibandingkan dengan luas sawit”

# KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN 7 KABUPATEN DENGAN SAWIT TERLUAS DI RIAU

DAYA BELI MASYARAKAT



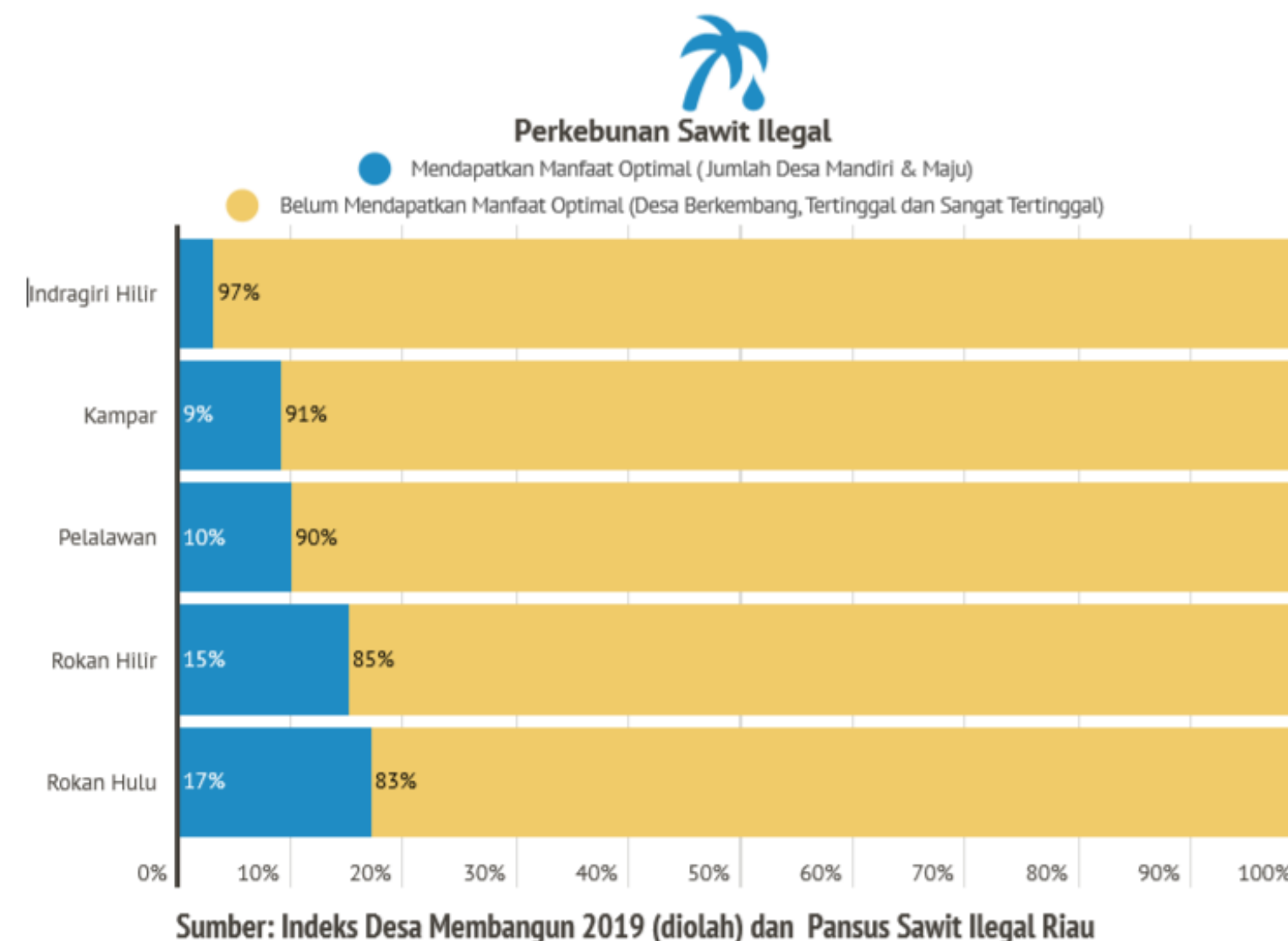
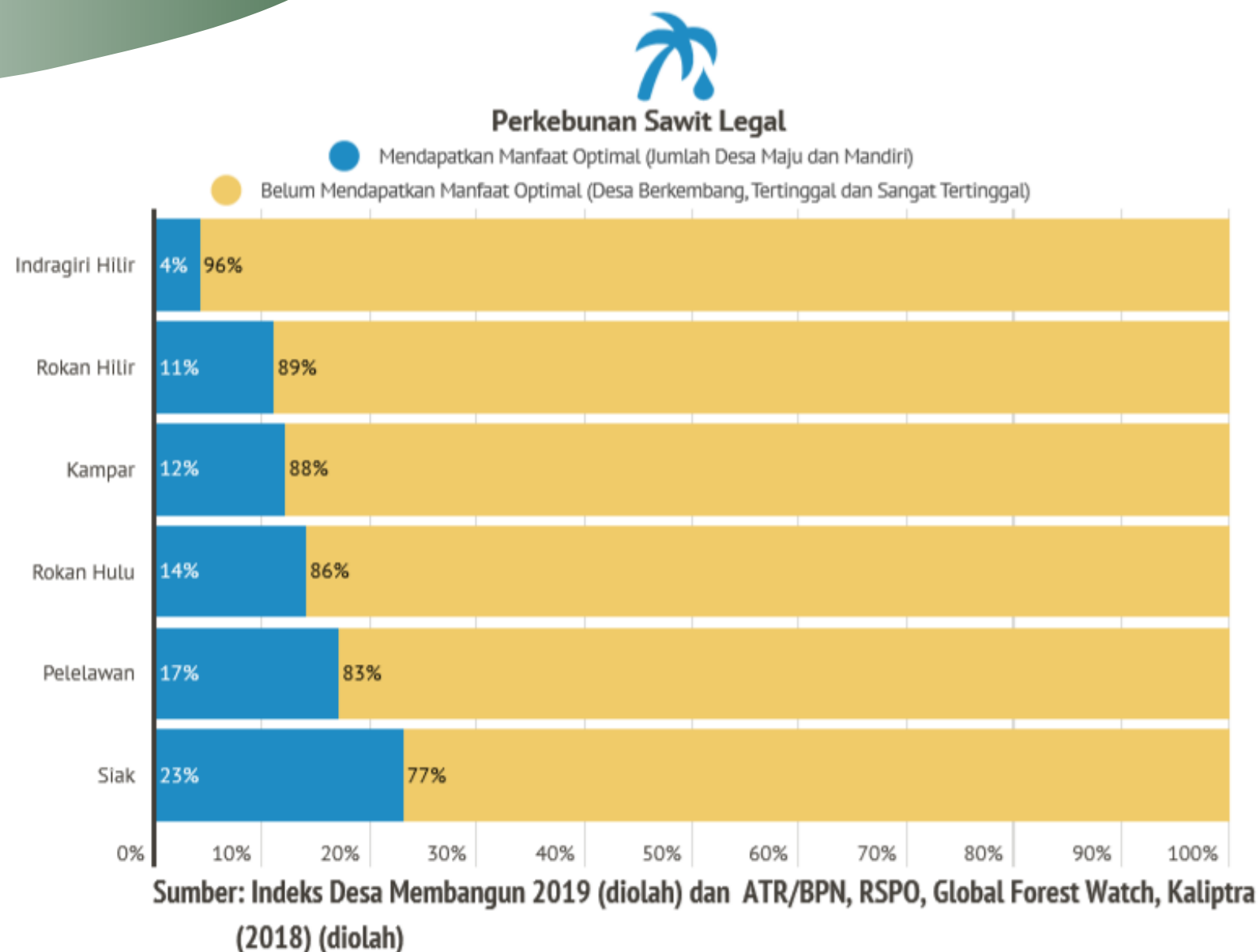
KETAHANAN PANGAN



“ 6 dari 7 kabupaten memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dan 4 dari 7 kabupaten termasuk rawan pangan. Diversifikasi komoditas dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan ketahanan pangan kabupaten tersebut ”



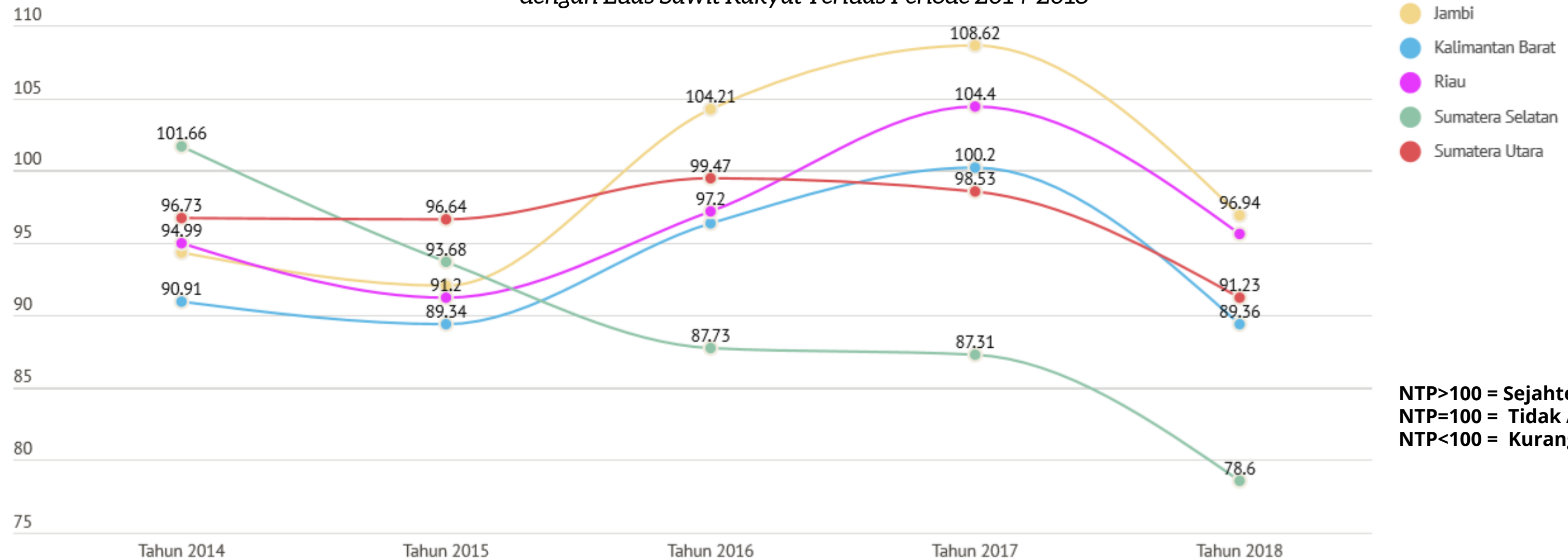
# PERKEBUNAN SAWIT DAN PEMBANGUNAN DESA DI RIAU



“Status pembangunan 576 desa di sekitar perkebunan sawit legal di Riau menunjukkan hanya 13% desa yang telah menerima manfaat optimal dari keberadaan pekebunan sawit yang dikontibusi 9 desa mandiri dan 67 desa maju. Sedangkan, 87% desa lainnya masih belum menerima manfaat optimal dari keberadaan perkebunan sawit yang dikontibusi 362 desa berkembang, 126 desa tertinggal dan 9 desa sangat tertinggal. Merujuk pada parameter penilaian IDM, desa-desa di Riau yang belum mendapatkan manfaat optimal dari perkebunan sawit disebabkan oleh rendahnya nilai indeks ekonomi dan indeks lingkungan khususnya pada parameter akses distribusi, akses terhadap lembaga kredit, dan kemampuan desa terkait tanggap bencana”

# MENILIK TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI SAWIT RAKYAT RIAU

Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat di 5 Provinsi dengan Luas Sawit Rakyat Terluas Periode 2014-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik 2014-2018

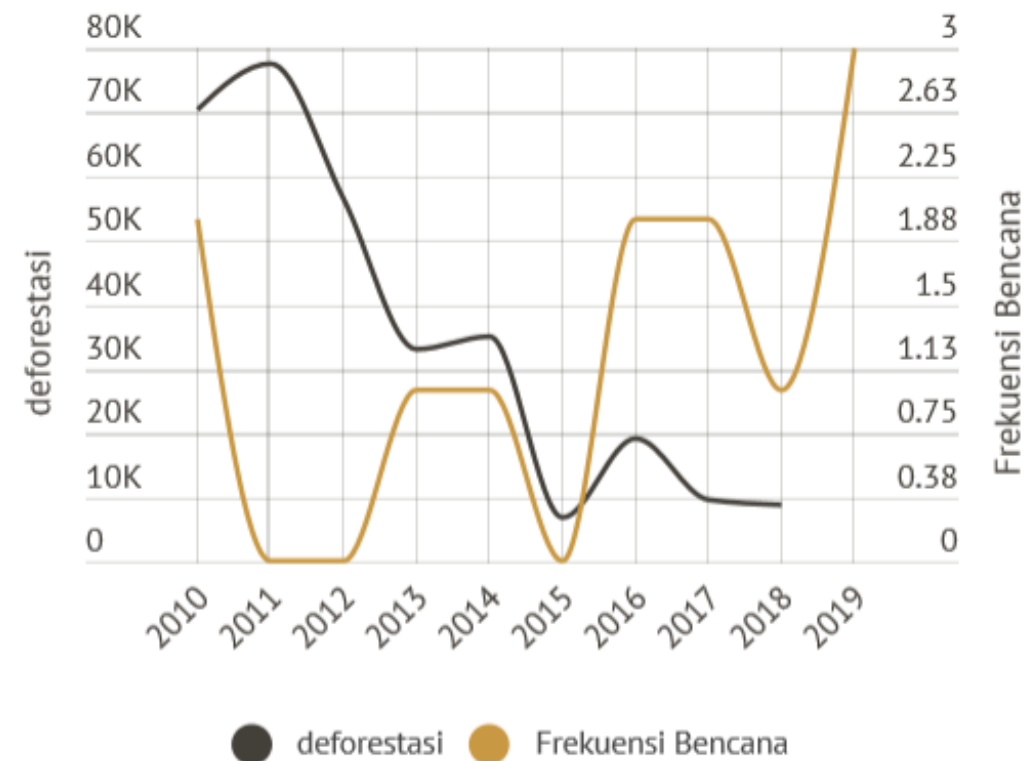
NTP > 100 = Sejahtera  
 NTP = 100 = Tidak Ada Perubahan  
 NTP < 100 = Kurang Sejahtera

“Dengan luas area tanam sawit rakyat terluas di Indonesia dan laju penambahan area tanam seluas 35,7 ribu ha setiap tahunnya, Namun hanya pada 2017 saja nilai NTP PR Riau yang menunjukkan petani sawit memiliki kesejahteraan yang tinggi. Tingkat kesejahteraan petani sawit yang rendah disebabkan oleh jumlah pengeluaran petani dalam proses produksi lebih besar dari pendapatan yang diterima dari harga jual produksi. Artinya penambahan area tanam bukanlah syarat mutlak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit”

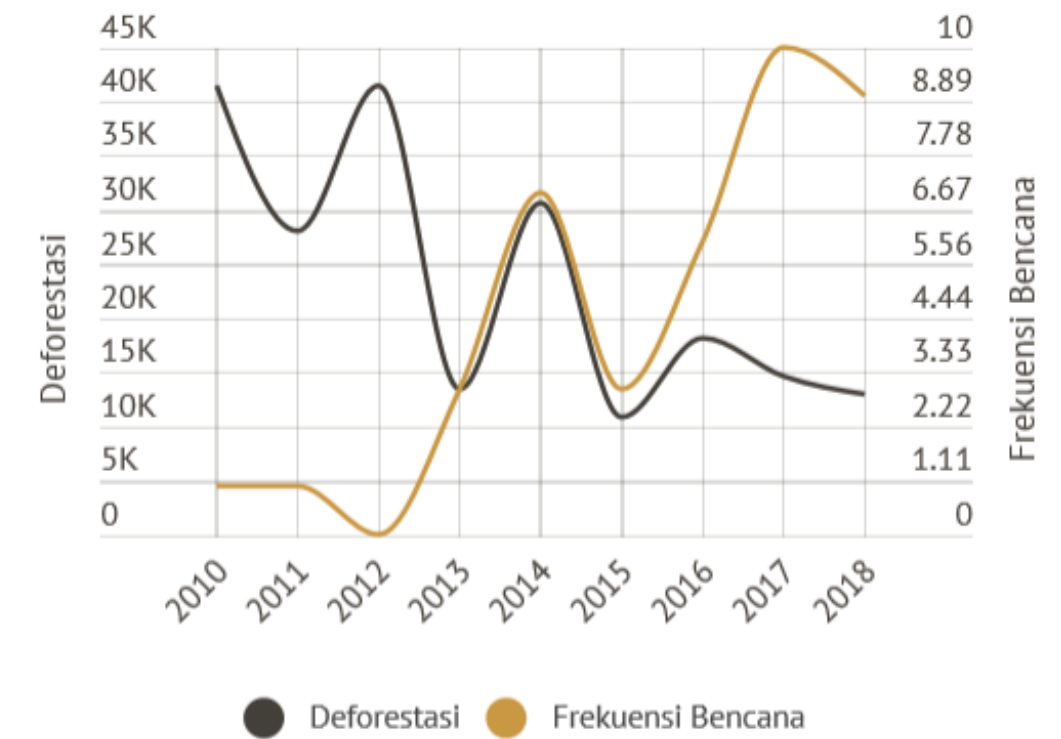


# HILANGNYA TUTUPAN HUTAN DAN KEJADIAN BENCANA

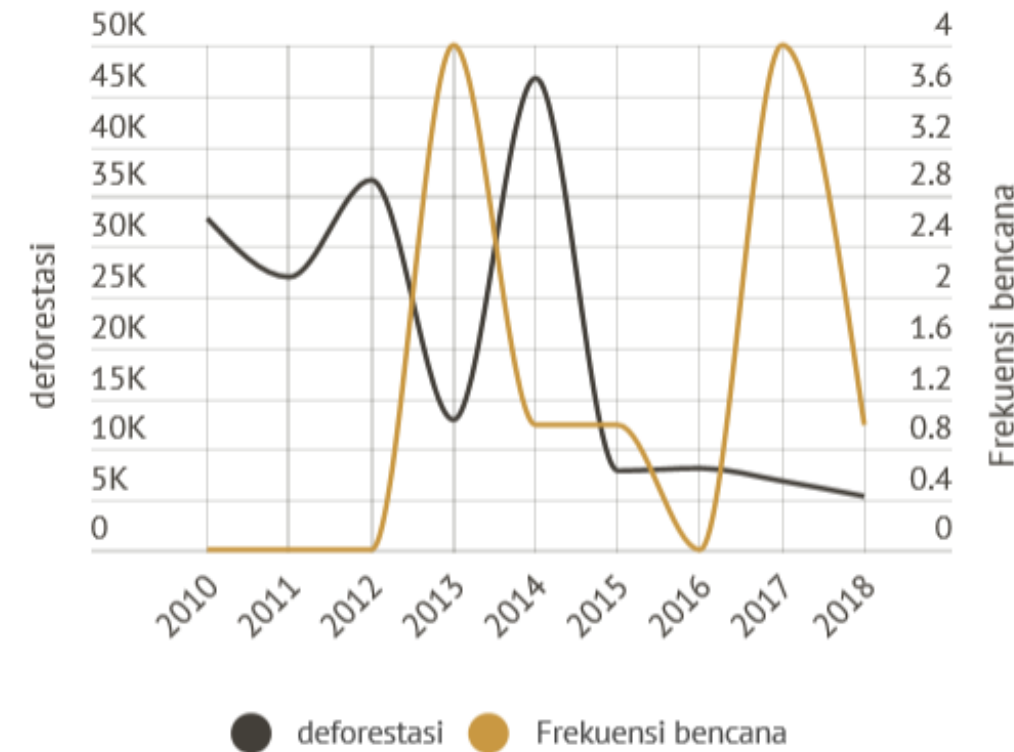
**PELALAWAN**



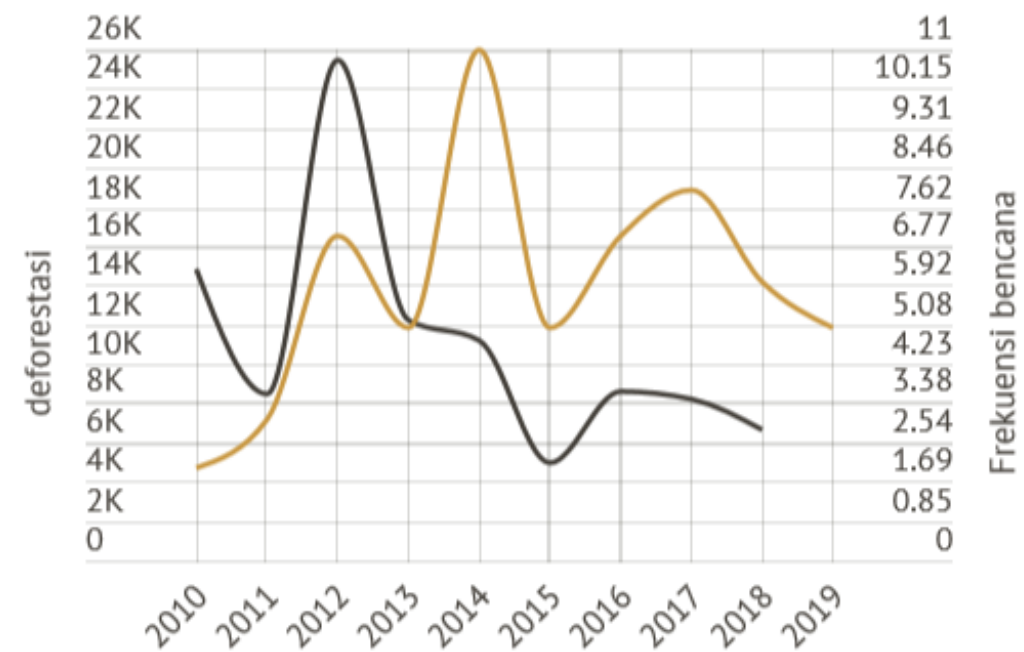
**INDRAGIRI HILIR**



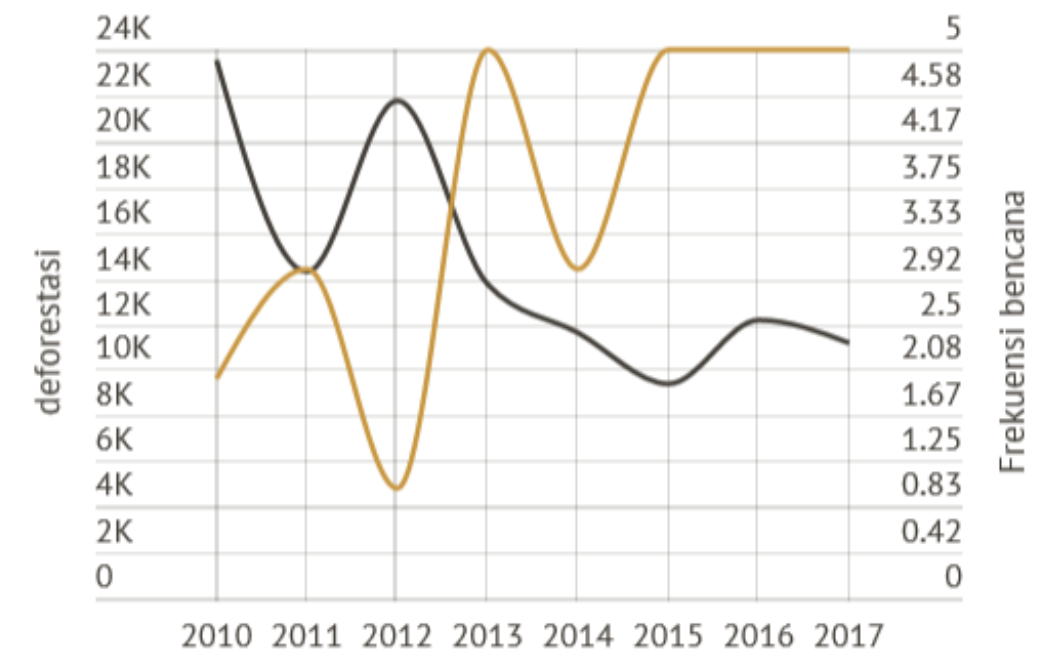
**BENGKALIS**



**ROKAN HULU**



**KAMPAR**

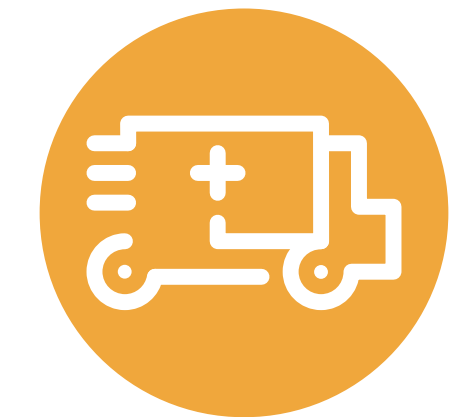
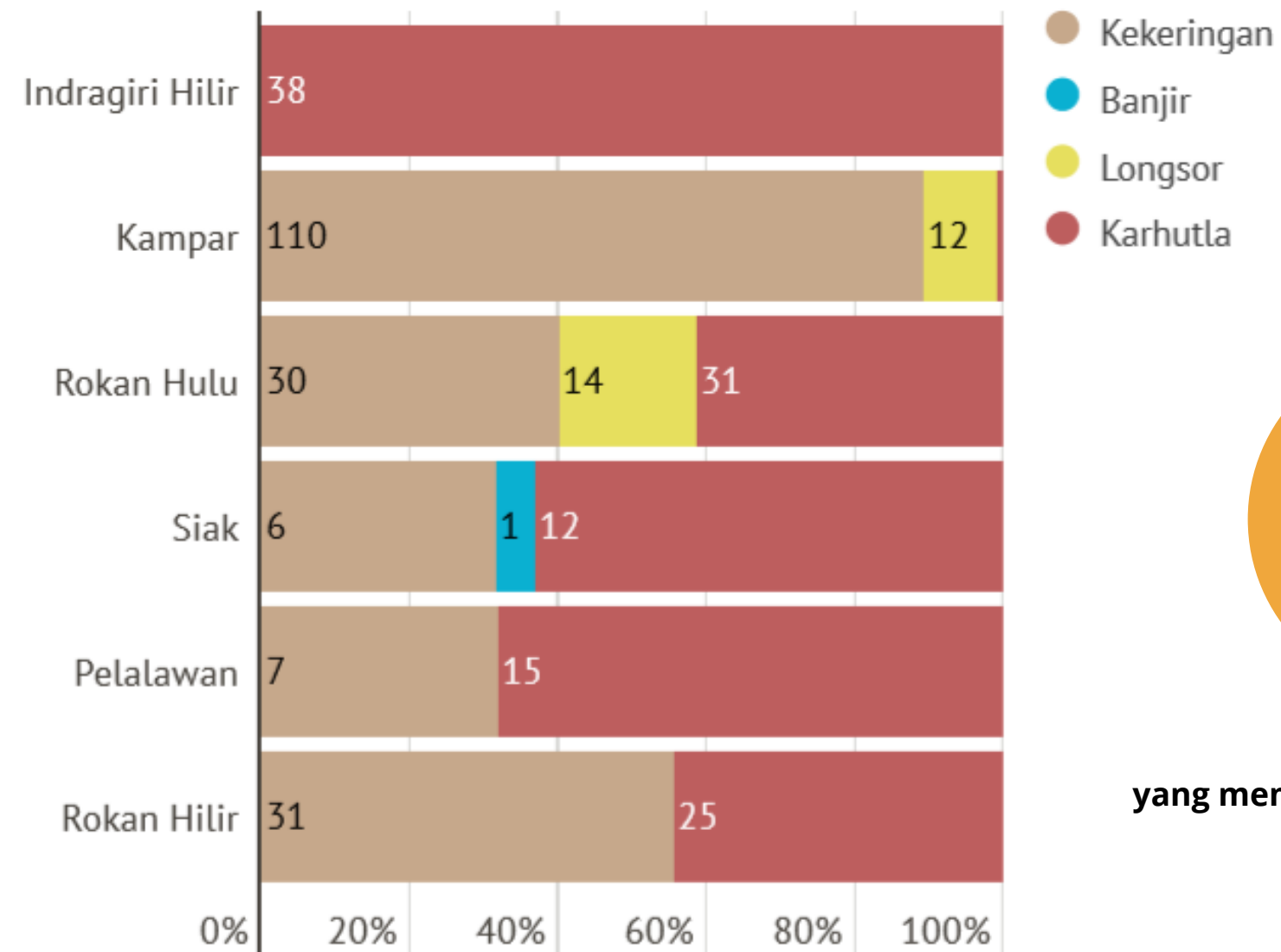
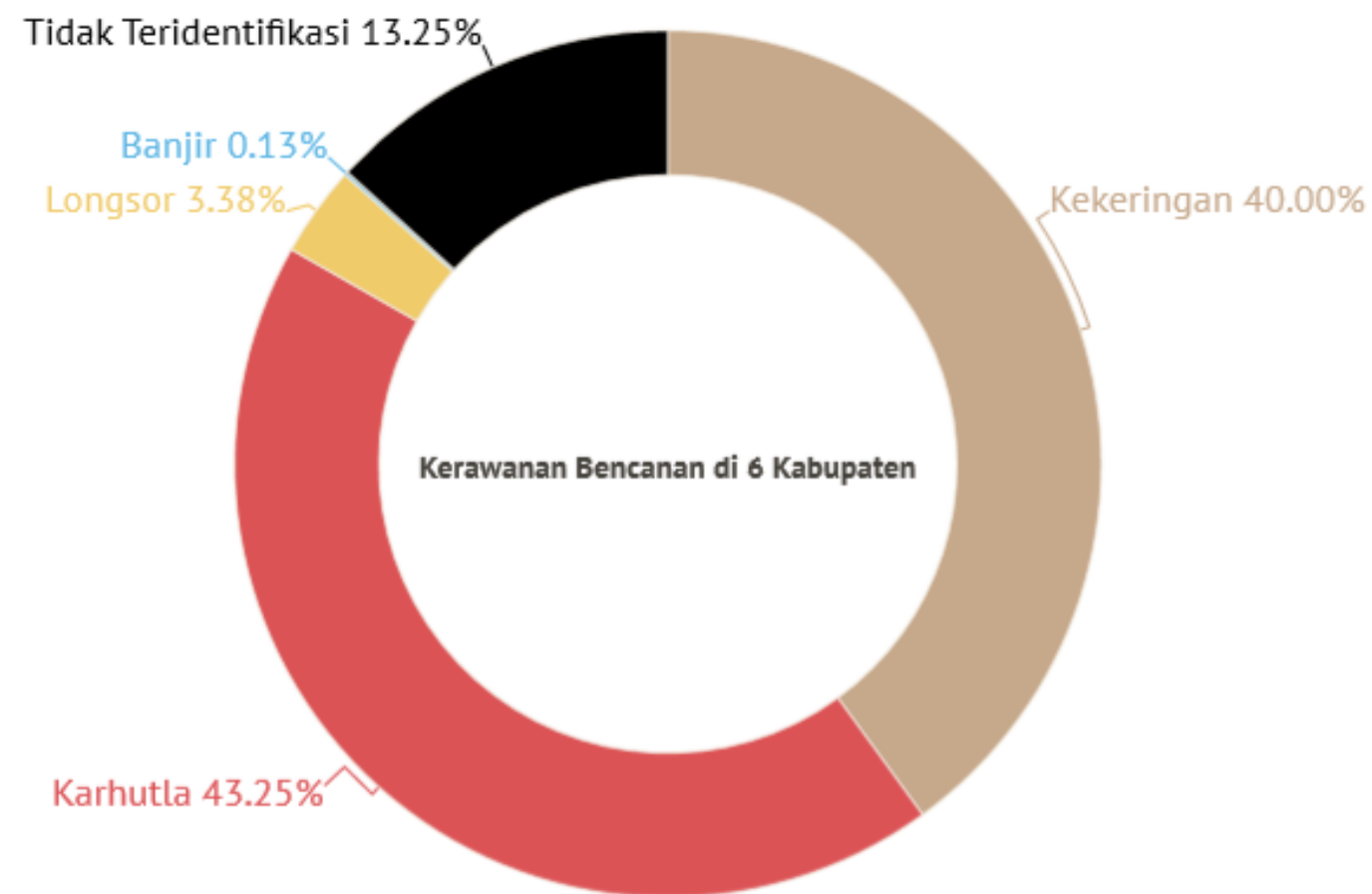


Sumber: Global Forest Watch dan BNPB (2019)

“Puncak hilangnya tutupan hutan dan puncak kejadian bencana ekologis di suatu kabupaten di Riau memiliki rentang perbedaan sekitar 2- 3 tahun. Jika disederhanakan, maka grafik hubungan antara keduanya adalah linear yang mana pada saat hilangnya tutupan hutan meningkat maka konsekuensi ekologi berupa bencana akan terjadi pada tahun berikutnya. Sayangnya di antara semua pola tersebut, periode tahun 2017 hingga 2019 menjadi periode “memanen” bencana ekologis yang dituai dari hilangnya tutupan hutan pada kurun waktu 2011-2015 silam”



## DESA DI SEKITAR PERKEBUNAN SAWIT DAN KERAWANAN BENCANA

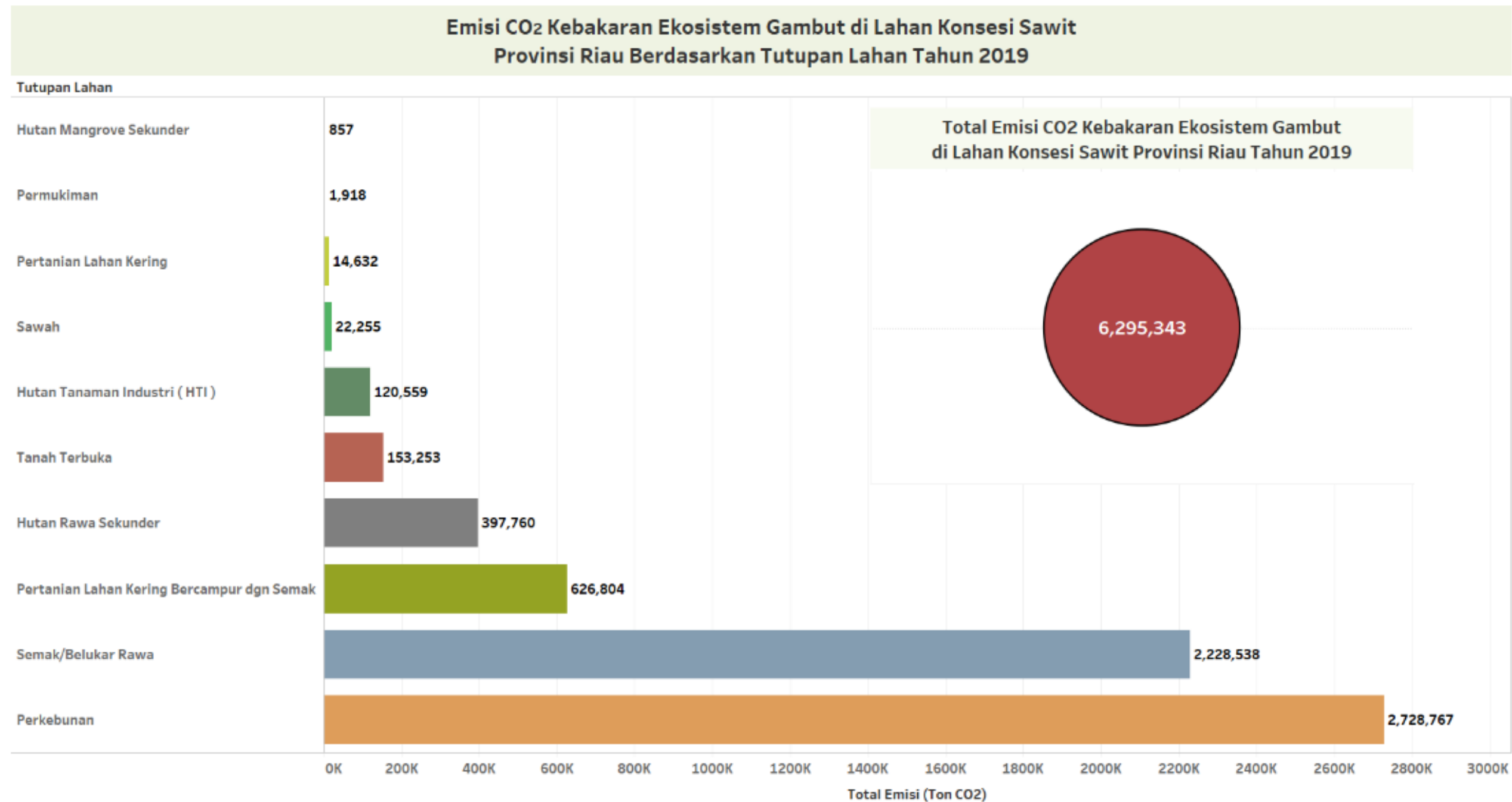


Hanya 15 % desa yang memiliki kapasitas manajemen bencana

Sumber: Data Potensi Desa (2018) dan BNPB (2019) (diolah)

“ Jenis kerawanan bencana ekologis yang dihadapi suatu desa beragam, namun secara umum 82% (471 desa) teridentifikasi rawan bencana ekologis. Atau dalam arti lain 8 dari 10 desa di sekitar perkebunan sawit di Riau rawan akan bencana ekologis. Meskipun potensi bencana di desa-desa sekitar perkebunan sawit 6 kabupaten terbilang besar, namun hanya 76 desa yang telah memiliki kapasitas manajemen bencana. Dalam arti lain 85% desa rawan bencana di sekitar perkebunan sawit Riau masih belum memiliki kapasitas manajemen bencana ”

# KERUGIAN DARI KARHUTLA DI KONSESI SAWIT BERGAMBUT DI RIAU



“**Persentase kebakaran ekosistem gambut di konsesi sawit Riau sangat besar yaitu 92,88 % atau seluas 14,7 ribu ha. Atas kebakaran ekosistem gambut di kawasan konsesi sawit tersebut, terjadi peningkatan emisi CO<sub>2</sub> yang diestimasi berkisar 6,2 juta ton CO<sub>2</sub>. Hasil analisis dari perhitungan potensi kerugian atas kebakaran ekosistem gambut di wilayah konsesi sawit tahun 2019 di Riau dari sisi karbon adalah sebesar Rp 1,5 triliun rupiah per tahun hingga kondisi ekosistem gambut bisa kembali full recovery**”

## Langkah Strategis ke Depan



Kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan perlu digantungkan pada keberagaman komoditas dan keseimbangan tingkat produksi antar komoditas perkebunan dan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat. Sebab, Pilihan untuk bergantung pada satu komoditas yang dominan akan terlalu berisiko pada perekonomian dan ketahanan daerah.



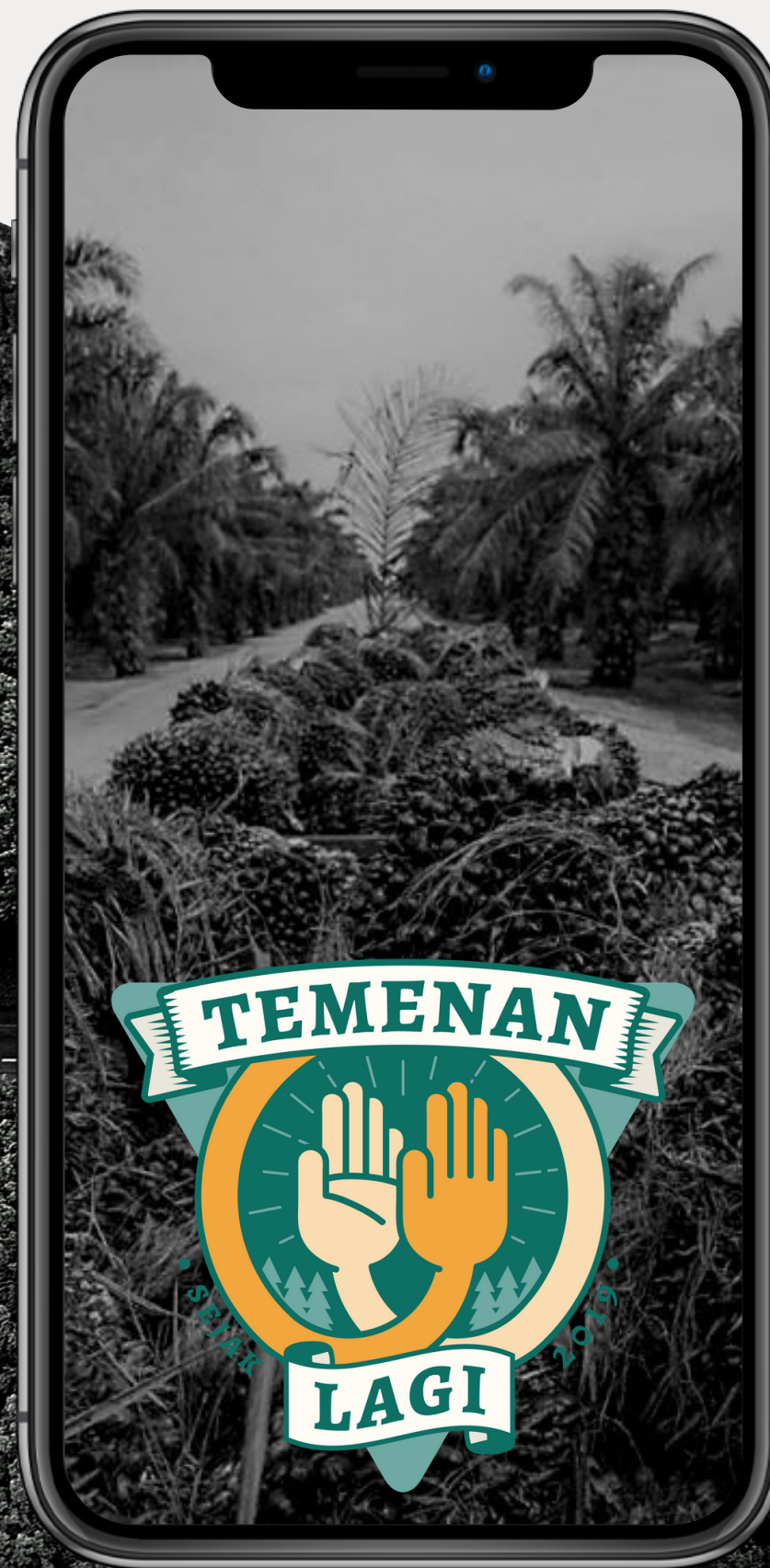
Mewujudkan desa mandiri yang berada di sekitar perkebunan sawit sebagai upaya mencapai keberhasilan pembangunan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Diperlukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh khususnya menindak lanjuti temuan sawit ilegal serta kolaborasi multi pihak untuk mengurai permasalahan pembangunan desa dengan memanfaatkan sistem CSR yang terukur dan sinergis dengan perencanaan daerah. Selain itu, penerapan mekanisme transfer fiskal ekologis yang digagas oleh Kemenkeu dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut.



Diperlukan langkah serius berupa kerja sama multipihak untuk mengurai permasalahan minimnya kapasitas manajemen bencana di desa sekitar perkebunan sawit di Riau. Fungsi dana desa ataupun kontribusi pihak swasta dapat menjadi alternatif yang dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam menghadapi bencana.



Terima  
Kasih!



Mari #Temenan Lagi  
untuk Indonesia  
Tangguh!